

DAFTAR PUSTAKA

Shabrina, Adinda Ayu. 2018. “Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon”, *Journal of Internasional Relation, Vol. 4 Nomor 1*, 20, hal 81.

Ibid

Komnas Perempuan, “Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019”, laman: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, pada tanggal 3 September 2019, pukul 02:42.

Inter-Agency Standing Committee, 2005. ” Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Keadaan Kedaruratan Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”, Geneva, hlm. 3.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang – Undang Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan.

Puspitawati, Herien. 2013. Konsep, Teori, dan Analisis Gender. *Skripsi*. Bogor: IPB.

Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & INSIST.

Khuza’I, Moh. 2013. “Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture”. Kalimah: *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 11 No 1*.

Ibid, hal.105.

Widayani, Ni Made Diska dan Sri Hartati. 2014. “Kesetaraan dan Keadilan Gender

- dalam Pandangan Perempuan Bali”. *Jurnal Psikologi Undip, Volume 13 No 2.*
- Komnas Perempuan, “Kerentanan Kekerasan Berbasis Gender dan HIV-AIDS pada Pekerja Migran Indonesia”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo/jakarta/documents/presentation/wcms_159846.pdf, diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 4:34.
- Umin Kango. 2009. “Bentuk – Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan”. *Jurnal Legalitas, Volume 2 Nomor 1, hal. 13.*
- PKBI DIY, “Kekerasan Berbasis Gender (KBG)”, <https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/> diakses pada tanggal 3 Desember 2019, pukul 21:54.
- Moerir, H. AS. 2012. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Joko Widodo. 2019. *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: Publik Citra).
- Ibrahim, Amin. 1999. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik Prinsip – Prinsip Manajemen*
- Layaman dan Suci Hartati. 2015. “Studi Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon”.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak dari Korban Kekerasan.

Peraturan Walikota Semarang yang sudah diperbaharui melalui SK Walikota No. 463/354 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak Seruni Kota Semarang.

Wawancara dengan Ninik Jumoenita selaku Koordinator di PPT Seruni Kota Semarang, tertanggal 28 Juni 2021 dalam Maunah, 2021.

“Seruni – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang”, Ria Ayu Novita, dkk. 2017. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2*.

Bappeda Kota Semarang. Laman: <https://bappeda.semarangkota.go.id>. Diakses pada 25 Februari 2024.

BPS Kota Semarang. Laman: <https://semarangkota.bps.go.id>. Diakses pada 25 Februari 2024.

Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016

DP3A Kota Semarang. Laman: <https://dp3a.semarangkota.go.id>. Diakses pada 26 Februari 2024

Surat Keputusan Walikota No.463/354 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak “SERUNI” Kota Semarang.